

FUNGSI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM MENGURANGI KONFLIK HORIZONTAL DAN SENGKETA TANAH PADA PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

ABSTRAK

W.E.Tinambunan
Rusmadi Awza
Nurjanah

Tujuan Penelitiann: Memotivasi penduduk lokal agar mampu menjawab berbagai masalah sengketa pertanahan petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan. Penyelesaian secara hukum bukanlah penyelesaian yang terbaik dalam menyelesaikan konflik antar petani dengan pihak perusahaan, tetapi masyarakat adat memiliki cara penyelesaian konflik yang tertuang dalam kearifan lokal masing masing adat. Untuk itu, perlu memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kecintaan kerja, kesadaran serta tanggungjawab masyarakat terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya secara wajar.

Metode pengumpulan data ialah Focus Discussion Group (FGD) Bersumberdaya Masyarakat membantu mengubah peranserta masyarakat sebagai penerima layanan menjadi partisipan yang aktif dalam komunikasi antarbudaya sehingga tidak terjadi konflik horizontal. Untuk pengumpulan data diadakan observasi, dan wawancara mendalam terhadap petani kelapa sawit, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Sedangkan analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian; (1) tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit memicu terjadinya konflik horizontal pada petani kebun kelapa sawit; (2) Prosedur jual beli tanah pihak ketiga tidak melalui prosedur bahkan perampasan hak pada petani; (3) ketidakjelasan regulasi lahan yang kurang responsive dan berpihak pada kepentingan rakyat Rokan Hilir; (4) kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan untuk pertanian,kehutanan dan pertambangan tidak jelas; (5) kurang optimalnya fungsi lahan tanah, baik untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya air maupun sumber daya manusia.

Perlu reformasi agraria, sebab UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Semangatnya perlu dikembalikan pada keberpihakan terhadap rakyat petani yang merupakan mayoritas di Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu, kemampuan berkomunikasi antar budaya sesama petani kelapa sawit dapat menciptakan komunikasi dua arah yang sangat komprehensif.

Kata Kunci: komunikasi antar budaya, konflik horizontal, petani kelapa sawit

Isu Strategis:

Kemajemukan masyarakat bisa mengandung kesulitan, karena dapat menjadi picu bagi lahirnya disintegrasi yang mengarah pada terganggunya stabilitas nasional maupun daerah. Gagalnya komunikasi lintas budaya mengakibatkan gangguan kantibmas yang muncul tidak hanya berbentuk kasus kriminalitas konvensional yang dilakukan oleh individu dan kelompok tetapi juga gangguan kantibmas yang berskala luas sehingga dapat mengancam kesatuan dan persatuan di daerah dan bahkan bangsa. Misalnya, Konflik lahan petani kebun sawit di Rokan Hilir sering terjadi dan yang menjadi korbannya masyarakat petani yang tidak mampu melakukan perlawanan terhadap pemodal maupun kelompok pengusaha yang bekerjasama dengan oknum-oknum aparat pemerintahan tertentu.

Gangguan kantibmas yang didasarkan pada etnosentrisme saat ini semakin kompleks, karena dihadapkan pada perkembangan situasi yang penuh dengan tantangan di samping dinamika masyarakat yang cukup tinggi. Upaya menciptakan konflik dan kerusuhan antar etnis dan umat beragama memungkinkan untuk terjadi jika masyarakat hanya berorientasi pada etnosentrisme.

Adanya intimidasi, ganti rugi tanah yang tidak sesuai, penguasaan lahan secara paksa dan sebagainya menimbulkan prasangka sosial atau stereotipe masyarakat tempatan terhadap pertumbuhan penduduk yang begitu besar di Kabupaten Rokan Hilir. Karena arus migran penduduk kadang-kadang tidak terkendali, maka muncul pula ketidakpercayaan masyarakat lokal kepada pemerintah, di mana masyarakat lokal seolah-olah memandang pemerintah bekerjasama dengan pendatang untuk merugikan masyarakat lokal. Muncullah konflik yang adakalanya menimbulkan hambatan dalam perjalanan ruang gerak pembangunan daerah.

Di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di Kabupaten Rokan Hilir, ternyata masih ada kekuatan yang terus dipelihara untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya di kalangan masyarakat adat. Kearifan menyelesaikan konflik, pertikaian melalui pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat luhur merupakan kearifan budaya berupa tradisi dalam menyelesaikan konflik.

1. Latar Belakang

Kemiskinan, membuat seseorang melakukan migrasi ke daerah yang dianggap dapat memperbaiki taraf hidupnya. Namun, adakalanya dalam interaksi sosial menimbulkan konflik sosial apabila masyarakat saling tidak memahami norma-norma sosial, atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, terjadi konflik sosial secara horizontal atau perselisihan yang disebabkan ketidak selarasan antara tindakan, norma, nilai, dan nilai sosial dalam interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Beberapa kasus tanah petani kelapa sawit yang terjadi di Kepenghuluan Kota Paret tahun 1992 Kecamatan Simpang Kanan antara Timbang Sianipar dengan masyarakat seluas 500 ha mengakibatkan satu unit kantor pos Polisi dibakar, 8 orang masyarakat ditangkap dan diadili serta salah seorang dari pihak masyarakat bernama Rizal depresi kemudian meninggal. Daerah Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah terjadi bentrok antara masyarakat Suku Hamba Raja yang berjumlah 15.000 orang dengan ribuan karyawan

PT.Ivomas tahun 2003 disebabkan tanah yang dimiliki PT Ivomas adalah tanah milik hak ulayat suku hamba raja. Selanjutnya sengketa tapal batas antara Riau dengan Sumatera Utara tahun 2008 yang tidak kunjung selesai menyebabkan beberapa orang masyarakat Pasir Limau Kapas ditangkap dan diadili di Sumatera Utara dan 1 unit alat berat kelompok tani KSK dibakar. Terakhir di Kepenghuluan Sei Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tanah masyarakat banyak yang diperjual belikan oleh aparat desa kepada pengusaha yang mempunyai modal sehingga terjadi bentrok antara pekerja dari pihak pengusaha dengan masyarakat.

Masyarakat Rokan Hilir yang sejak dari dulu merasa hidupnya tidak terganggu, akhir-akhir ini akan mendapat gangguan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ditambah lagi dengan penguasaan-penguasaan lahan yang mereka olah selama ini dirampas atau dimiliki oleh pihak pengusaha perkebunan dengan berbagai cara. Adanya intimidasi, ganti rugi tanah yang tidak sesuai, penguasaan lahan secara paksa dan sebagainya menimbulkan prasangka sosial atau stereotipe masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Karena petani kelapa sawit sering menjadi pihak yang dirugikan oleh pengusaha kelapa sawit, maka muncul pula ketidakpercayaan petani kelapa sawit kepada pemerintah, di mana petani kelapa sawit memandang pemerintah bekerjasama dengan pengusaha untuk merugikan petani. Muncullah konflik yang adakalanya menimbulkan hambatan dalam ruang gerak pembangunan daerah.

2. Tujuan Khusus

- 2.1 Menangani masalah-masalah konflik horizontal pada masyarakat petani kelapa sawit yang disebabkan lahan pertanahan khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang masyarakatnya multikultural, sehingga terbina integrasi sosial
- 2.2 Mengurangi kesenjangan komunikasi antarsuku yang disebabkan perbedaan-perbedaan bahasa daerah, ekonomi maupun adat istiadat sesudah menjadi warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir
- 2.3 Tersusunnya rencana pemerintah kabupaten dalamantisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal

3. Urgensi Penelitian

Karena janji pembauran agraria tidak dipenuhi pemerintah, proses proletarisasi di pedesaan terus berlangsung. Masyarakat desa, mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Untuk makan mereka harus menjual tenaga kerjanya karena kehilangan sumber penghidupannya dari tanah. Masyarakat pedesaan sudah makin miskin. Tanah-tanah dalam skala luas sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Pemerintah daerah di sisi lain berdalih memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Pada hal, jika mau serius membantu kepentingan petani pemerintah tinggal menunaikan saja program pembaruan agraria seperti redistribusi tanah telantar untuk petani.

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat perlu melakukan suatu penelitian, sehingga melalui penelitian ini dapat dicarikan solusi atau bentuk komunikasi yang paling tepat untuk membentengi tidak terjadinya konflik yang mengarah kepada stereotipe atau prasangka sosial bersifat horizontal.

STUDI PUSTAKA

a. *Kemiskinan dan Interaksi Sosial*

Adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu tetap merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia untuk memecahkannya. Kemiskinan begitu lekat dengan masyarakat desa. Gambaran desa yang menunjukkan serba kekurangan dan secara geografis maupun mehyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat sering dijadikan sebagai wujud dari kemiskinan, ekonomi, pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Maka, apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.

Tiga faktor penentu prasangka yang diduga mempengaruhi komunikasi yang menurut Poortinga (1990) yaitu;

(1) *Stereotip.*

Stereotip adalah sikap dan malahan karakter yang dimiliki seseorang untuk menilai orang lain semata-mata berdasarkan pengelompokan kelas atau pengelompokan yang dibuatnya sendiri. Stereotip cenderung mengarah pada sikap yang negatif terhadap orang lain. Menurut Gerungen (1988) stereotip merupakan suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang/golongan lain yang umumnya bercorak negatif.

(2) *Jarak Sosial.*

Jarka sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka.

Gerungen (1988) mengukur penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam unsur-unsur seperti; (a) kesediaan untuk menikah dengan orang lain; (b) bergaul rapat sebagai kawan anggota dalam klubnya; (c) menerima sebagai tetangga; (d) menerimanya sebagai rekan sejabatan; (e) menerimanya sebagai warga negaranya; (f) menerimanya sebagai pengunjung negaranya; dan (g) tidak ingin menerimanya di dalam negaranya.

Peneliti berasumsi bahwa semakin dekat jarak sosial seorang komunikator dari suatu etnik dengan seorang komunikan dari etnik lain maka semakin efektif pula komunikasi di antara mereka, sebaliknya jika semakin jauh jarak sosial maka semakin kurang efektif dan memungkinkan terjadinya prasangka sosial.

(3) *Diskriminasi.*

Diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antarmanusia maupun komunikasi di antara mereka. Doob (1985) mengakui diskriminasi merupakan suatu perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumberdaya. Prasangka dan diskriminasi merupakan dua belahan mata uang, prasangka dipandang sebagai ideologi atau keyakinan dan diskriminasi adalah terapan ideologi tersebut.

a. Penyebab Konflik:

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik (1982). Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart & Logan, 1993). Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai 'perang dingin' antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata – kata yang mengandung amarah.

Konflik juga diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha

yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu – waktu terjadi kembali.

b. Etnisitas :

Etnisitas terbangun dalam relasi kekuasaan antar kelompok. Ia merupakan sinyal keterpinggiran, sinyal tentang pusat dan pinggiran, dalam konteks sejarah yang selalu berubah. Di sini, pusat dan pinggiran dibentuk dalam representasi politik. Seperti argumen Brah (1996), Adalah penting untuk menjadikan sebuah aksioma bahwa apa yang direpresentasikan sebagai 'pinggiran' tidaklah sepenuhnya pinggiran tetapi merupakan efek dari representasi itu sendiri. 'Pusat' tidaklah lebih pusat daripada pinggiran.

Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita tergantung kepada apa yang kita pikirkan sebagai bukan kita. Orang Jawa bukan Madura, Batak dll. Konsekuensinya, etnisitas akan lebih baik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik (Barth 1969).

Konsepsi kulturalis tentang etnisitas merupakan sebuah usaha yang berani untuk melepaskan diri dari implikasi rasis yang inheren dalam sejarah konsep ras. Seperti ditulis Stuart Hall (1996): Jika subjek kulit hitam dan pengalaman kulit hitam tidak distabilkan oleh alam atau esensi lainnya, maka pastilah ia terkonstruksi secara historis, kultural, dan politis. Term etnisitas mengakui kedudukan sejarah, bahasa, dan kebudayaan dalam konstruksi

subjektivitas dan identitas, seperti halnya fakta bahwa semua wacana selalu punya tempat, posisi, situasi, dan semua pengetahuan selalu kontekstual."

Masalah dalam konsepsi kulturalis tentang etnisitas adalah diabaikannya pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan dan ras. Etnisitas dapat dikembangkan ke dalam diskusi tentang multikulturalisme, untuk menunjukkan formasi sosial yang beroperasi dalam kelompok yang plural dan sejajar, daripada kelompok yang terasialisasi secara hirarkis. Konsekuensinya, Hooks (1990) dan Gilroy (1987) lebih suka memakai konsep "ras", bukan karena ia berhubungan dengan keabsolutan biologis atau kultural, tetapi karena ia berhubungan dengan isu kekuasaan. Sebaliknya, Hall (1996) mencoba membangun kembali konsep etnisitas dengan memusatkan perhatian pada di mana kita semua terlokasikan secara etnis.

c. *Komunikasi Antar Budaya*

Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan demikian, kita segera dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu situasi di mana suatu pesan di sandi dalam suatu budaya dan harus di sandi balik dalam budaya lain. Seperti diketahui, budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi.

Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, ialah perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan menimbulkan makna yang berbeda-beda pula, yang dapat menimbulkan segala macam kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman atas komunikasi antar budaya, kita dapat mengurangi atau hampir menghilangkan kesulitan-kesulitan ini (*Mulyana dan Rakhmat, 1990*).

Poter dan Samovar dalam *Mulyana dan Rakhmat (1990)* menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Artinya kita dihadapkan pada suatu kesulitan di mana pesan disandi dalam suatu budaya, dan harus disandi balik oleh budaya itu. Konsekuensinya suatu makna yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda budaya akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Namun kesulitan semacam ini dapat diatasi, paling tidak dikurangi melalui pemahaman komunikasi budaya.

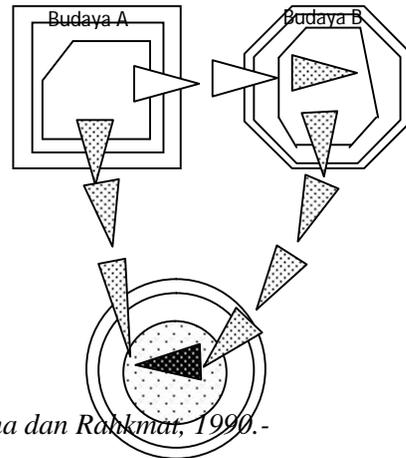
Dalam komunikasi budaya yang efektif, pertama-tama kita harus menyadari faktor-faktor budaya yang mempengaruhi, baik dalam budaya kita maupun dalam budaya orang lain. Untuk itu kita perlu mengetahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan budaya. Perbedaan tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul. Sedangkan persamaannya membantu untuk mendekati diri dengan pihak lain yang memiliki budaya yang berbeda.

Selanjutnya *Wilbur Schramm* dalam *Mulyana dan Rakhmat (1990)* mengemukakan beberapa persyaratan untuk mengadakan komunikasi antar budaya yang efektif, yaitu; *Pertama*, adanya sikap menghormati anggota budaya lain sebagai manusia; *Kedua*, harus menghormati budaya lain sebagai mana apa adanya, dan bukan sebagaimana yang kita hendaki; *Ketiga*, ada-lah menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; dan *Keempat*, komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangkan hidup bersama orang dari budaya yang lain.

Untuk lebih menyederhanakan proses penyandian komunikasi budaya yang berbeda di bawah ini di gambarkan model komunikasi budaya, yang menggambarkan pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian dan penyandian balik pesan.

Gambar 1

Komunikasi Antar Budaya



Sumber : Mulyana dan Rakhmat, 1990.-

Lebih lanjut Mulyana dan

Budaya C

Rakhmat (1990) menjelaskan bahwa dalam setiap budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan bentuk budaya. Ini menunjukkan individu yang telah dibentuk oleh budaya. Bentuk individu sedikit berbeda dari bentuk budaya yang mem-pengaruhinya. Ini menunjukkan pula dua hal yaitu; *Pertama*, ada pengaruh lain di samping budaya yang membentuk individu dan; *Kedua*, meskipun budaya merupakan kekuatan dominan yang mempengaruhi individu, orang-orang dalam suatu budaya pun mempunyai sifat-sifat yang berbeda.

Penelitian yang telah dilakukan

1. Tinambunan (2004) dalam penelitiannya berjudul: Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik Tionghoa, Batak, Melayu, Jawa dan Minangkabau di Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa; etnis Tionghoa lebih cenderung tertutup berkomunikasi terhadap etnis lainnya apabila dibandingkan dengan etnis Batak, sehingga etnis Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari lebih membuka diri apabila berkomunikasi dengan sesama etnis Tionghoa.
2. Tinambunan (2008) lebih lanjut mengatakan bahwa; muncul permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ataupun pelestarian kebudayaan sebagai media komunikasi. Hal itu terjadi karena masyarakat penutur atau pengguna bahasa itu kurang menyadari tentang dirinya sendiri, keinginan, atau pun faktor-faktor lain yang berakibat pada budaya itu. Siapa pun yang masuk sebagai imigran ke daerah baru, tidak boleh memaksakan kehendaknya agar kebudayaan yang dibawanya wajib dilaksanakan pada daerah baru di mana ia tinggal.
3. Tinambunan (2008) dalam penelitian lain yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwa: 95,6% kurang setuju dan bahkan tidak setuju apabila penduduk

yang pindah ke daerah tujuan memaksakan kebudayaan daerah yang dibawanya untuk dilaksanakan warga lokal. Siapapun tidak mempunyai hak untuk memaksakan kebudayaannya kepada orang lain, sebab hal itu melanggar hak asasi seseorang. Bahkan sebagai migran harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan daerah yang baru dijumpainya. Namun, pergeseran budaya terjadi akibat adanya perkawinan lintas etnis sesuai dengan semakin majunya cara berpikir generasi muda.

4. Tinambunan (2010) bahwa “tatanan kehidupan orang Batak selalu bergerak dalam harmoni keseimbangan. Sekali pun orang Batak telah mengadaptasikan nilai-nilai baru, mengadaptasikan diri dengan lingkungan budaya baru, namun mereka tetap tradisional, mempertahankan ikatan-ikatan kekeluargaan..... Perpindahan penduduk sangat menguntungkan apabila masing-masing menjaga dan menghormati masyarakat lain di daerah tempat tinggalnya. Perpindahan penduduk jangan diartikan mengkerdikan masyarakat lokal, tetapi masyarakat lokal dan migran harus bekerjasama dalam membangun daerah tempat tinggalnya”.
5. Tinambunan (2011) lebih lanjut mengemukakan bawa masyarakat dengan kekurangsiapan intelektual, profesional dan mental dalam teknologi informasi modern atau kekuatan globalisasi mengakibatkan terjadinya prasangka sosial di antara etnis. Seharusnya masyarakat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk melestarikan dan mempertahankan efektivitas komunikasi antarbudaya. Kelemahan yang ada perlu diperbaiki sehingga adanya peluang dalam melaksanakan komunikasi antarbudaya, di samping harus pula diwaspadai bahwa ancaman budaya yang menjurus pada konflik-konflik sosial.
6. Tinambunan (2012) mempertajam hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa; Etnosentrisme dalam rasa *in group* menyebabkan prasangka dalam setiap kelompok, sehingga memandang kelompok etnik lain sebagai manusia barbar, bodoh, dan tidak beradab. Hal ini terjadi karena dalam prasangka tercakup sikap antipati yang didasarkan suatu cara menggeneralisasikan yang salah dan tidak fleksibel.

MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah.

Pemerintah Daerah selama ini masih menghadapi banyak kendala dalam upaya menangani konflik horizontal. Kendala itu antara lain disebabkan terbatasnya sumber biaya dan tenaga profesional yang dimiliki pemerintah daerah untuk kepentingan layanan dalam bentuk komunikasi antar etnis, serta kesadaran maupun peranserta masyarakat relatif masih rendah. Dilakukannya penelitian ini, di samping dapat meringankan beban pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai terobosan dalam menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat. Selain itu, dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

2. Bagi Masyarakat.

Penelitian yang menekankan prakarsa masyarakat sebagai basis utama dari upaya-upaya komunikasi antar budaya yaitu saling menghormati dalam masyarakat yang multi kultur. Untuk itu, masyarakat dapat meningkatkan perbaikan pelayanan berbagai aspek untuk

kepentingan pemecahan masalah-masalah serupa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, penelitian ini akan menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah-masalah sosial sehingga tidak terjadi konflik horizontal.

Selain yang dikemukakan di atas, manfaat penelitian adalah secara nyata dan bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa sebagai; (1) Publikasi Jurnal Terakreditasi Nasional atau Internasional dan; (2) Paten.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif. Suharsimi Arikunto (1995) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesis tertentu, dan juga hanya menggambarkan apa adanya. Di dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap kelakuan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi konflik antara pengusaha perkebunan dengan petani perkebunan kelapa sawit dan atau sesama petani perkebunan kelapa sawit disebabkan penyerobotan tanah, penguasaan hak dengan menggunakan kekerasan, dan juga adanya surat-surat kepemilikan yang ganda.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

3.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa sawit, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di tingkat kecamatan. Penentuan informan berdasarkan informan kunci dan bola salju berguling sampai data-data yang diperlukan sudah lengkap. Informan yang terpilih memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat (opini) dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah informasi tentang fungsi komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik horizontal yang menyebabkan stereotip atau prasangka sosial dalam masyarakat tani.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan observasi, peneliti juga dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2004).

Data yang dikumpulkan lebih difokuskan pada data yang dibutuhkan untuk perencanaan dalam komunikasi antar budaya dalam menanggulangi konflik horizontal penduduk lokal terhadap perkembangan sosial ekonomi. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan jalan mengumpulkan langsung (primer dan sekunder), FGD dengan masyarakat lokal dan pendatang, tokoh masyarakat serta *stakeholders* terkait.

b. Wawancara

Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara di mana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2003:67).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka terhadap informan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak komunikasi lintas etnis migran penduduk terhadap peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Informasi yang lebih luas dapat diperoleh, interpretasi serta pembicaraan responden dapat meningkatkan intensitas kepercayaan responden terhadap peneliti.

c. Sosialisasi/Penyuluhan FGD

Peneliti melakukan Sosialisasi / Penyuluhan terhadap kelompok petani perkebunan sawit. Melalui penyuluhan dan sosialisasi (FGD) tentang komunikasi antar budaya petani kebun sawit akan memahami pentingnya harmonisasi dalam bermasyarakat. Melalui sosialisasi dan penyuluhan di lapangan akan terjadi perubahan sikap yaitu saling menghormati dan menghindari terjadinya konflik sosial.

e. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada interview atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingannya (Moleong, 2004:216).

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian dikompilasi ke dalam tabel dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif untuk menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang arah kebijakan Funfi Komunikasi Antar Budaya Dalam mengurangi Konflik Horizontal di Kabupaten Rokan Hilir.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yakni teknik analisis yang

dilakukan melalui proses pemikiran logis, baik secara induktif, deduktif, analogis maupun komparatif. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar dapat terjun langsung ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin dapat mengotori data, selain itu perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. (Moloeng,1994)

b. Triangulasi

Triangulasi sebagai tehnik kualitatif yang digunakan sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang memperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton), dengan jalan sebagai berikut:

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. (1) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, maupun orang pemerintahan; dan (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong,2004).

PEMBAHASAN

1. KONFLIK HORIZONTAL

Dari hasil pengumpulan data lapangan dan wawancara yang dilakukan tim peneliti diperlukan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat yang sangat berperan dalam pengentasan konflik. Karena akar konflik disebabkan tidak adanya perlindungan terhadap asset penghidupan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat khususnya petani kebun kelapa sawit. Selain itu, minimnya kesempatan kerja, terbatasnya akses informasi, permodalan dan sumberdaya lainnya yang ditengarai sebagai penyebab akar konflik horizontal.

Untuk dapat mensinergikan masyarakat tani yang majemuk, perlu dilakukan pola pengaturan dan penjagaan keteraturan sosial sehingga bisa berjalan secara tertib, produktif, dan berkesinambungan. Kontrol sosial juga berfungsi sebagai sarana usaha untuk mempengaruhi dan menundukkan perilaku individu pada norma-norma masyarakat. Dengan menciptakan sinergisitas pada gilirannya diharapkan akan bermuara pada penguatan kemampuan pemeliharaan keamanan dan menghindarkan konflik di masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu menyadari bahwa akan mengalami kegagalan dalam membangun masyarakatnya apabila masyarakatnya tidak tertib. Untuk itu, permasalahan tanah harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik antara petani dengan petani, warga dengan pengusaha bahkan warga dan aparat keamanan. Kasus-kasus penyelesaian tanah berkaitan dengan alas hak kepemilikan tanah yang tidak jelas, tata batas yang tidak jelas, serta ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Banyak lahan sengketa memperoleh sertifikat dan diperparah dengan adanya pendirian bangunan dalam berbagai ukuran di lahan yang menjadi obyek sengketa.

Proses proletarisasi di pedesaan Rokan Hilir terus berlangsung. Masyarakat desa yang mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Masyarakat petani kebun sawit menjadi miskin, disebabkan tanah dalam skala luas dikuasai oleh perusahaan besar. Terjadinya proletarisasi masyarakat pedesaan, konflik agraria bakal makin terus terjadi. Konflik akan semakin tinggi dan pasti akan mendatangkan korban. Tanah yang dimiliki petani sudah semakin sempit, sementara kebutuhan petani semakin meningkat. Pemerintah daerah kadangkala berpikiran jangka pendek dengan lebih memilih memberikan izin kepada perusahaan daripada berpihak kepada masyarakat tani. Ketidakberpihakan itu menimbulkan konflik lahan. Maka, perlu adanya memberikan hak-hak tenurial masyarakat adat dan harus ada kepastian, keadilan dan kedaulatan tenurial pada masyarakat tani serta merealisasikan pembaruan agraria.

Maraknya konflik pertanahan tidak terlepas pula dari politik pertanahan yang ada. Konflik pertanahan muncul ketika hak menguasai negara (HMN) berbenturan dengan hak asasi (HAM) warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat) maka solusinya adalah sinkronisasi HMN dan HAM. Politik agraria sudah seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Politik hukum agraria harus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Hal itu sesuai dengan pokok pemikiran Bernhard Limbong (2012) dalam bukunya Konflik, Pertanahan, Penanganan dan Penyelesaian menyatakan dua hal dalam hubungan dengan konflik pertanahan. Dua hal tersebut lebih bersifat antisipatoris dan

preventif, yakni pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pertanahan yang lebih responsif dan mendesak dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Dari hasil wawancara dan analisa lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan tim peneliti, beberapa penyebab konflik di Rokan Hilir bagi petani kelapa sawit disebabkan;

1. Tumpang tindih lahan memicu terjadinya konflik. Tak sedikit kasus tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit yang meruncing dan mengakibatkan timbul kerugian moril dan material bahkan terjadinya korban jiwa. Salah satu contoh adalah pembakaran salah satu pos di Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud. Selain itu juga jual beli tanah pihak ketiga karena prosedur jual beli tanah yang tidak jelas bahkan perampasan. Adanya oknum kepenghuluan menjual lahan hutan kepad apengusaha. Salah satunya di Kpeenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas yaitu terjadi penebangan hutan bakau secara besar-besaran.
2. Batas dengan tetangga sesama pemilik kebun kelapa sawit sering menjadi salah satu pemicu munculnya konflik bagi sesama petani, disebabkan batas-batas kebun yang dimiliki petani sebahagian besar tidak dikelilingi parit, dan juga tidak ada patok batas antara sesama pemilik kebun sawit. Konflik perbatasan dengan tetangga terjadi apabila buah kelapa sawit yang dimiliki tetangga hasilnya bagus, sedangkan yang dimiliki petani sawit lainnya kurang bagus. Konflik perbatasan dengan tetangga sebahagian karena kurangnya kesadaran petani untuk mengurus langsung surat-surat resmi yang dimiliki petani sawit pada instansi pemerintahan, sehingga bertahun-tahun ada petani kelapa sawit tidak mengantongi surat kepemilikan dari pihak pemerintah. Tanah yang dimiliki awalnya berdasarkan kepercayaan dari pihak pembeli, kemudian timbul permasalahan bahwa tanah adalah milik mereka bukan milik dari yang mengolah tanah setelah lahan kosong tersebut berhasil diolah dan sudah mendatangkan hasil sawit yang banyak.
3. Hilangnya buah sawit yang akan dipanen juga sering menimbulkan konflik karena saling mencurigai antara sesama petani kelapa sawit. Adanya saling mencurigai di antara sesama petani kelapa sawit, kadang-kadang terjadi saling intip sesama pemilik kebun sawit untuk mengetahui siapa yang melakukan panen sawit di kebun yang mereka miliki.
4. Responden penelitian yang bekerja sebagai petani kelapa sawit konflik horizontal terjadi pada sesama petani kelapa sawit, namun sebahagian terjadi disebabkan adanya pihak perusahaan yang mendatangi petani kelapa sawit agar mereka bersedia menjual kebun maupun tanah petani dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Juga terjadi dalam kelompok petani menjadi dua kubu, sebahagian tidak mendukung apa yang diinginkan pihak perusahaan dan sebahagian lagi mendukung apa yang diminta perusahaan. Dampaknya bukan lagi konflik antara petani dengan pihak perusahaan, melainkan menjurus pada konflik yang bersifat horizontal.

Pemerintah daerah minim sosialisasi dan realisasi dalam bentuk program pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sebaiknya pemerintah daerah memberikan insentif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan kepada apetani, berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan pertanian kelapa sawit. Hampir semua isi PP nomor 12 tahun 2012 menguntungkan petani namun belum kelihatan

adanya *good will* pemerintah daerah merealisasikannya lewat program-program membantu petani kelapa sawit.

Secara khusus petani kelapa sawit pada umumnya menyelesaikan permasalahannya setelah adanya campur tangan dari kelompok tani maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat tinggal petani kelapa sawit. Penyelesaian yang dilakukan kelompok tani maupun tokoh masyarakat bersifat kekeluargaan dan tidak saling merugikan. Para petani kebun kelapa sawit tidak mau mudah terpropokasi oleh siapapun apabila ada orang khususnya pihak luar yang mau menghasut teman-teman sesama petani sawit.

Cara lain petani kelapa sawit untuk menghindari konflik horizontal adalah kebersamaan dalam mengikuti gotong royong, menghadiri acara perkawinan, mengunjungi orang sakit maupun jika ada kemalangan yang tidak melihat perbedaan suku, agama maupun daerah asal petani. Selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan perwiridan di mesjid, maupun arisan-arian kampung. Selanjutnya, responden mengakrabkan dirinya apabila tidak bekerja pada sore hari saling berkunjung dan saling bertemu di warung-warung kopi desa sambil bertukar pikiran apabila mengalami hambatan dalam mengolah kebun pertanian kelapa sawit yang mereka miliki.

Di samping itu petani kelapa sawit memelihara dan merawat kearifan lokal agar senantiasa hidup dan menyala di dalam hati petani kelapa sawit. Para petani terus mepupuk, merawat dan selalu menjadi ikhtiar dan tindakan masyarakat petani kelapa sawit Kabupaten Rokan hilir, sehingga diharapkan tak akan ada lagi anak yang harus kehilangan bapak atau ibunya hanya karena beda agama, beda aliran politik, beda etnisitas dan aroma rasis lainnya. Juga tak akan ada lagi rumah dan harta beda yang dijarah, dan dibakar hanya karena perbedaan identitas. Setiap konflik ada solusinya. Para leluhur telah memberikan peninggalan atau warisan nilai untuk itu dan tinggal tekad petani kebun kelapa sawit, mau menggunakannya atau membuangnya.

Munculnya sejumlah konflik horizontal antara petani kelapa sawit dengan pihak lainnya dapat disimpulkan disebabkan tiga hal yaitu; Ketidakjelasan regulasi lahan yang kurang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat terutama petani Rokan Hilir. Kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan secara tidak jelas, baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya air maupun sumber daya manusia.

Reformasi agraria mutlak dilakukan. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Semangatnya perlu dikembalikan pada keberpihakan terhadap rakyat petani yang mmerupakan mayoritas di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya penuntasan reformasi agraria, secara langsung maupun tidak langsung daerah dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat, seperti konflik horizontal dan kekerasan sosial, sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri.

Beberapa faktor lain penyebab terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan :

- a. Kehadiran perusahaan mengambil hak-hak masyarakat, hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat.

- b. Kehadiran perusahaan menyebabkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat seperti terjadi pencemaran, polusi udara dan gangguan lainnya sehingga masyarakat merasa perlu melakukan tindakan perlawanan.
- c. Kehadiran perusahaan tidak memiliki sumbangsih terhadap masyarakat lokal, sehingga masyarakat merasa perusahaan sebagai pengurus kekayaan lokal.
- d. Perusahaan tidak melibatkan dan memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam hal peluang bekerja dan pelaksanaan proyek-proyek perusahaan.

Lebih lanjut hasil wawancara terhadap responden mengatakan bahwa konflik lokal sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas; Perbedaan distribusi kekuasaan inilah yang kemudian memunculkan dua kelompok petani kelapa sawit yang berbeda posisi yakni kelompok dominan dan kelompok subordinat. Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mempertahankan status quo, sementara yang berada pada posisi subordinat selalu berupaya mengadakan perubahan terus menerus. Sering terjadi konflik horizontal yang disebabkan perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas pada petani kelapa sawit.

- b. Prasangka/persepsi

Prasangka atau pemaknaan yang tidak benar terhadap simbol dan identitas orang lain yang menimbulkan terjadinya konflik. Terjadinya penggunaan simbol-simbol tertentu digunakan pihak ketiga untuk mengadu domba para petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit sering dibenturkan dengan berbagai cara, dan konflik horizontal tidak terelakkan dan pada akhirnya menguntungkan pihak pengusaha sebagai pemilik modal.

- c. Perbedaan Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan fikiran, perasaan dan tindakan. Perbedaan rasa percaya, keyakinan bahkan ideologi menyebabkan terjadinya konflik horizontal petani kelapa sawit. Kearifan lokal sering dilupakan, pada hal menyelesaikan suatu permasalahan pada masyarakat tidak memerlukan kekerasan cukup dengan pendekatan kearifan lokal yang dimiliki setiap etnis. Setiap adat, setiap budaya dan setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kearifan lokal dimasing-masing adat memiliki fungsi yang secara umum membantu kehidupan masyarakatnya sendiri. Hal itu meliputi permasalahan dalam rumah tangga, agraria, tata pemerintahan, penyelesaian konflik, spiritual, nilai nilai perikehidupan, dan lain lain. Konflik yang timbul antar suku maupun antar kelas dapat diselesaikan dengan lokal genius dari masing-masing kelompok masyarakat.

- d. Perbedaan kepentingan

Kepentingan masyarakat tani tidak semuanya sama. Ada latar belakang kepentingan material, ada pula kekuasaan, dan bahkan ada kepentingan mengadu domba masyarakat yang kondusif. Adanya perbedaan kepentingan pada setiap individu atau kelompok merupakan potensi terjadinya konflik. Perbedaan kepentingan yang merusak tatanan hidup harmonis dalam masyarakat petani akan dapat menimbulkan dampak kemiskinan dan juga merusak ekonomi keluarga yang sejahtera.

e. Kurang komunikasi

Kegagalan dalam berkomunikasi menyebabkan kedua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka, sehingga petani kebun kelapa sawit menjadi salah paham dan menimbulkan terjadinya konflik. Petani kebun kelapa sawit yang jarang berbaur dengan masyarakat lokal atau berbeda dalam agama, etnis, dan asal usul orientasi kedaerahannya sangat sensitif dan merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dibanding dengan orang lain

f. Kepemimpinan yang kurang efektif

Konflik karena kepemimpinan yang kurang efektif terjadi pada kehidupan bersama dalam komunitas petani kelapa sawit. Kepemimpinan kurang efektif mengakibatkan masyarakat mudah bergerak dan bahkan tidak terkendali tanpa ada yang menggerakkan.

g. Ketidakcocokan peran

Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik. Tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa tidak mampu memerankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dan akhirnya muncul konflik.

h. Kesenjangan

Kesenjangan adalah adanya bentuk-bentuk perlakuan yang tidak adil, perbedaan kemampuan dalam mengakses suatu kebutuhan, tidak meratanya pembangunan adalah penyebab terjadinya konflik. Adanya diskriminasi pembangunan pedesaan di Rokan Hilir menimbulkan gejolak pada masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam kebutuhan prasarana dan sarana pembangunan.

i. Ketidak puasan/kecewa

Adanya rasa tidak puas atau kecewa atas apa yang dialami atau diterima oleh petani kelapa sawit atau kelompok menyebabkan mudah terjadi konflik horizontal. Para petani kelapa sawit merasa kecewa dengan janji yang diberikan pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, termasuk pihak perusahaan yang tidak pernah memenuhi janjinya kepada petani kelapa sawit.

Untuk itu, berdasarkan hasil rangkungan wawancara dengan responden dan menghindarkan konflik horizontal bagi petani kelapa sawit adalah :

- a. Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat lokal.
- b. Memberikan kompensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan.
- c. Melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat.
- d. Melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan.
- e. Merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada. Tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di daerahnya tetapi harus diberdayakan dan menjadi asset penting dalam mendukung pembangunan kelapa sawit

C. MENGATASI KONFLIK

Konflik sosial yang terjadi dan tidak terkelola dengan baik dapat berakibat pada lemahnya sistem produktivitas masyarakat maupun pihak-pihak terkait seperti perusahaan, dan pemerintah, disebabkan iklim lingkungan sosial yang tidak kondusif. Sebaliknya bila, potensi konflik sosial dapat dikelola dengan baik melalui interaksi dan komunikasi yang baik, dapat berdampak positif pula bagi upaya mewujudkan kesejahteraan social. Namun, bila kurang mampu mengelolanya maka dapat berdampak buruk bagi kedamaian, keserasian kehidupan sosial di daerah tersebut.

Berbagai isu muncul dan berkembang di masyarakat di masyarakat Rokan Hilir. Aspek tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial, yang merupakan potensi konflik, salah satunya karena masalah kesenjangan akses ekonomi antar masyarakat setempat dengan pendatang, serta antar masyarakat dengan pihak perkebunan. Pengelolaan potensi konflik agar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu dikembangkan dan dipertahankan usaha untuk menumbuhkan keserasian hidup antar berbagai pihak yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal terkait dengan pengembangan hasil perkebunan kelapa sawit di masa yang akan datang.

Interaksi dan komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, berpotensi menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Dari perspektif perilaku dalam proses sosial, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Konflik akan selalu berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Penyebab konflik bukan hanya bisa terjadi karena permasalahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, tapi bisa juga disebabkan kelompok lain, seperti pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi yang memanfaatkan isu tentang putera daerah.

Manyadari keberadaan konflik dan memahami keberadaan konflik secara dini akan mencegah disintergrasi kehidupan masyarakat di seputar perkebunan kelapa sawit. Konflik berpotensi menimbulkan inefisiensi atau bahkan pemborosan yang serius ketika sampai mengganggu operasionalisasi perusahaan dan usaha tani perkebunan rakyat yang ada. Stabilitas sosial, ekonomi dan politik setempat sangat terganggu dan akhirnya rakyatlah yang menjadi korban lebih besar dan perusahaan besarpun menghadapi masalah dalam berinvestasi di lahan perkebunan sawit.

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri primordial sulit dipecahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul interaksi rumit antarkekuatan berbeda di samping variabel kondisi sosial wilayah ini. Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita.

Faktor-faktor pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat

kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat yang bersifat kekeluargaan .

Di antara permasalahan yang sering terjadi dan menyebabkan timbulnya konflik adalah adanya data dan informasi yang tidak jujur dan tidak dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga sulit menemukan kesepakatan dan terjalannya komunikasi. Bagi masyarakat, proses pengelolaan hasil sumber daya sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak pengelola antara lain koperasi dan pengusaha.

Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antarpihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Adanya data dan informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan merupakan syarat bagi terjalannya komunikasi di atas.

Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di atas, harus diingat juga bahwa masyarakat Rokan Hilir memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Model penyelesaian konflik melalui kearifan lokal menjadi salah satu cara yang sangat efektif ditempuh oleh masyarakat untuk menemukan bentuk dan jenis masalah dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Mengurangi resiko dan biaya sosial yang tinggi, karena masing-masing pihak berusaha membangun dialog dan keterbukaan terhadap pentingnya kesepakatan damai daripada proses pembuktian terhadap fakta hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, banyak pihak menaruh perhatian terhadap proses penyelesaian sengketa berbasis pada nilai-nilai dan kearifan lokal. Dalam memahami konteks nilai dan budaya lokal dalam merumuskan alternatif strategi dalam penyelesaian sengketa, masyarakat melibatkan diri untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan mereka melalui berbagai informasi ditengah keterbukaan akses baik melalui informasi dari aparat pedesaan maupun melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Kegiatan inilah yang dilakukan dan yang akan membantu masyarakat dan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa dalam merumuskan masa depan dan pilihan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada proses dan mekanisme adat, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.

Perlu diupayakan bagaimana meningkatkan peran komunitas atau masyarakat petani dalam berkontribusi terhadap reputasi dan citra yang lebih baik bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, melegitimasi untuk perusahaan beroperasi secara sosial, menyediakan untuk pemanfaatan tenaga kerja local. Di samping itu peran masyarakat juga dapat berkembang kearah terwujudnya keamanan yang lebih besar bagi operasinal perusahaan dan terpeliharannya pemanfaatan infrastruktur lingkungan sosial ekonomi lebih baik.

Konflik lokal juga perlu dihindari agar pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik di daerah. Pendekatan-pendekatan lain yang harus dilakukan untuk untuk mencegah agar tidak terjadi konflik lokal di Rokan Hilir dirangkum sebagai berikut;

2. **Pendekatan modal sosial (*sosial capital*)**. Di masa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial yang ada dalam masyarakat petani kelapa sawit. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan pemerintah

daerah Kabupaten Rokan hilir karena kemampuan modal ekonomi pemerintah daerah yang sangat terbatas. Di sisi lain, permasalahan sosial petani kelapa sawit cenderung semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Untuk itu, pengembangan pelayanan sosial yang mengandalkan modal sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut.

3. Pendekatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Masalah kebudayaan sangat penting untuk diperhatikan. Karena budaya telah mengalir dalam hidup masyarakat. Secara antropologis manusia telah dibelenggu oleh adat istiadatnya. Bahkan, kadang-kadang hal tersebut menjadi penghambat proses pembangunan. Sering terjadi konflik antara kebudayaan dan modernisasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama dan kebudayaan sering kali telah lebur dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sangat membedakan mana yang agama dan mana yang kebudayaan. Karena eratnya hubungan pembangunan politik dan kebudayaan, maka berkembanglah aliran pemikiran kebudayaan politik. Pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir mutlak diperlukan untuk tidak terjadinya konflik bagi masyarakat petani kelapa sawit.

4. Pendekatan Agama

Pendekatan keagamaan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, melalui nilai-nilai agama diharapkan masyarakat akan tidak mudah untuk terpancing melakukan konflik.

5. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya dilakukan oleh tokoh adat di masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya yang dianut di masyarakat sehingga akan meningkatkan persatuan dan mencegah terjadinya konflik horizontal. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikatnya tergantung kepada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.

Tatanan kehidupan orang Batak selalu bergerak dalam harmoni keseimbangan. Harmoni ini tersimpul dalam falsafah Batak: "*Manat mardongan tubu/sabutuha* (bersikap hati-hati kepada kerabat semarga); *elek marboru* (berlaku sayang kepada penerima wanita; dan *somba marhula-hula* (menaruh hormat kepada marga pemberi wanita) yang dikenal "DALIHAN NA TOLU" atau Tungku Nan Tiga". Oleh karena itu sekali pun orang Batak telah mengadaptasikan nilai-nilai baru, mengadaptasikan diri dengan lingkungan budaya baru, namun sekaligus mereka tetap tradisional, mempertahankan ikatan-ikatan kekeluargaan. Pendekatan tersebut lebih berhasil daripada pendekatan hukum karena keberadaannya telah lahir jauh sebelum ada hukum atau peraturan-peraturan.

6. Pendekatan Multi Kultur

Konsep multi kultur perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat dapat memahami berbagai karakteristik budaya lain, sehingga kehadiran budaya lain tidak dipandang secara curiga dan sinis terhadap keberadaan simbol-simbol komunitas lain.

7. Pendekatan Pluralisme

Melalui konsep pluralisme masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kehadiran budaya dan komunitas lain. Masyarakat memandang keberagaman sebagai suatu yang indah dan penuh persaingan secara positif untuk memajukan komunitasnya masing-masing. Terjadinya pertukaran nilai dan budaya adalah bentuk positif adanya pluralisme di tengah masyarakat sehingga terjadi bentuk-bentuk kemajuan.

8. Pendekatan Perkawinan

Melalui perkawinan antar etnik diharapkan akan terjadi pertukaran budaya dan peningkatan hubungan persaudaraan antar etnik sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Melalui perkawinan antar etnis, masyarakat dapat melakukan acara-acara seremonial yang bersifat nasional dan bukan kedaerahan, atau juga melaksanakan kedua adat yang berlaku sesuai persetujuan kedua belah pihak

9. Pendekatan Interaksi Lintas Budaya

Adanya interaksi dalam bentuk pertemanan dan hubungan bisnis juga dapat meningkatkan terjadinya kesepahaman dan hubungan silaturahmi antar etnis sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Hidup berdampingan dengan tetangga yang bukan satu daerah asal, berbeda etnis, agama maupun kebiasaan-kebiasaan menjadi perekat dalam keharmonisan bermasyarakat apabila masing-masing etnis saling menghormati

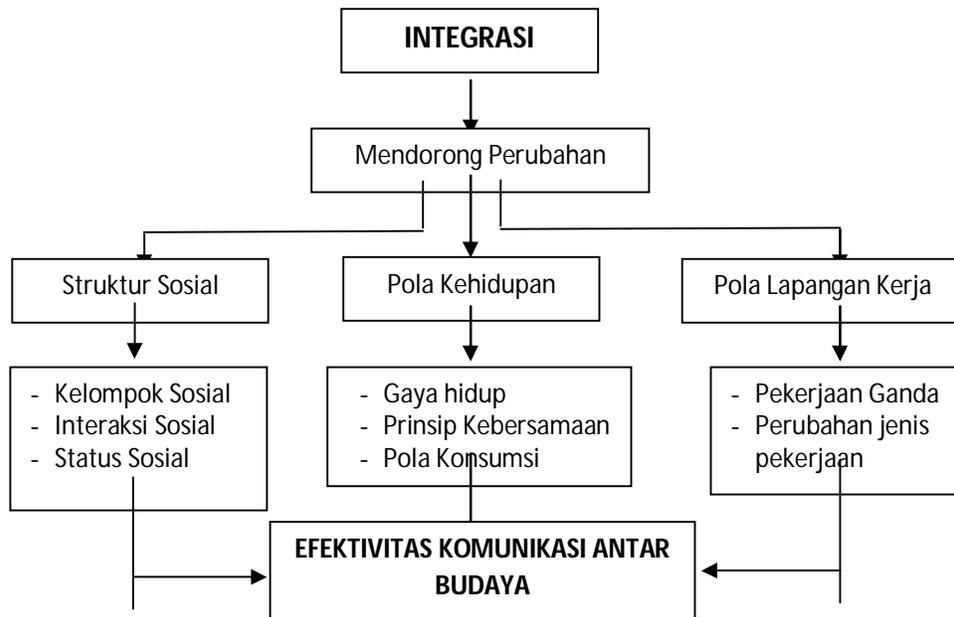
10. Pendekatan Akulturasi

Proses akulturasi adalah adanya bentuk perilaku mengembangkan budaya namun menghormati keberadaan budaya lain. Menghargai kebudayaan orang lain merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa mengorbankan kebudayaan asal individu

Dari berbagai uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pola komunikasi dan integrasi yang dilakukan petani kelapa sawit agar tidak terjadi konflik horizontal di Rokan Hilir adalah seperti gambar berikut;

Gambar 2

Komunikasi Antar Budaya



KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses proletarisasi di pedesaan Rokan Hilir terus berlangsung. Masyarakat desa yang mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Terjadinya proletarisasi masyarakat pedesaan, maka konflik agraria bakal makin terus terjadi dan mendatangkan korban. Pemerintah daerah kadangkala berpikir jangka pendek dengan lebih memilih memberikan izin kepada perusahaan daripada berpihak kepada masyarakat tani. Ketidakberpihakan itu menimbulkan konflik lahan. Maka, perlu adanya memberikan hak-hak tenurial masyarakat adat dan harus ada kepastian, keadilan dan kedaulatan tenurial pada masyarakat tani serta merealisasikan pembaruan agraria.
2. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya turut menentukan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan.
3. Komunikasi antar budaya pada petani kelapa sawit di Rokan Hilir mengutamakan akulturasi budaya apabila kelompok-kelompok individu petani kelapa sawit memiliki kebudayaan yang berbeda saling berhubungan secara langsung dengan intensif. Percampuran

kebudayaan atau asimilasi terjadi kalau dua kebudayaan kehilangan identitas masing-masing dan menjadi satu kebudayaan. Jelaslah bahwa melalui akulturasi individu yang sudah mempunyai kebudayaan berangsur-angsur dilepaskan dan kemudian menerima kebudayaan baru yaitu kebudayaan Melayu Riau

4. Konflik horizontal sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir juga dipengaruhi oleh; (a). Perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas; (b) Prasangka/persepsi; (c) Perbedaan nilai; (d) Perbedaan kepentingan; (e) Kurang berkomunikasi; (f) Kepemimpinan yang kurang efektif; (g) Ketidakcocokan; (h) Kesenjangan dan; (i) ketidakpuasan
5. Menghindarkan konflik horizontal bagi petani kelapa sawit pihak perusahaan perkebunan perlu memperhatikan; (a) Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat local; (b) Memberikan konvensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan; (c) Melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sosial sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat; (d) Melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan; dan (e) Merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada. Tenaga kerja sosial tidak hanya menjadi penonton di daerahnya tetapi harus diberdayakan dan menjadi asset penting dalam mendukung pembangunan pertanian kelapa sawit
6. Pendekatan yang perlu dilakukan kepada petani kelapa sawit antara lain; (a) Pendekatan modal social (*social capita*); (b) Pendekatan Pemerataan Pembangunan Daerah; (c) Pendekatan Agama; (d) Pendekatan Budaya; (e) Pendekatan Multi Kultur; (f) Pendekatan Pluralisme; (g) Pendekatan Perkawinan; (h) Pendekatan Interaksi Lintas Budaya; dan (i) pendekatan Akulturasi

B. SARAN-SARAN

1. Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat lokal; memberikan konvensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan; melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat; melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan; merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat memberi kemudahan kepada petani kelapa sawit dalam memenuhi kewajibannya untuk memiliki surat tanah yang sah dalam bentuk Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga petani kelapa sawit diikutsertakan dalam Program Prona.
3. Komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik horizontal sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan pendataan terhadap etnis-etnis sekaligus dapat menentukan metode yang tepat dan efektif dalam menanggulangi permasalahan petani kelapa sawit yang multikultur.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan pelayanan terhadap petani kelapa sawit, dan berpihak kepada rakyat apabila ada permasalahan antara petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, 2009, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta
- Antar Venus, 2007, *Komunikasi Yang Memerdekakan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jurnal ISKI Nomor 1 Agustus 2007, Bandung
- Anwar Arifin, 2008, *Opini Publik*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Bambang Rudito, 2007, *Audit Sosial*, Rekayasa Sains, Bandung
- Bangun, Rindu Kasih, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Bukit Suligi*, Jurnal Teroka, Nomor 3 Agustus 2009, Balitbang Riau
- Batakusuma Deddy Supriady, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Burhan Bungin, 2007, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Forum Intelektual Indonesia, 2007, *Jati Diri Bangsa Dalam Ancaman Globalisasi*, Airlangga University Press, Surabaya
- Ida Fariastuti, *Komunikasi Antarbudaya*, Wacana Jurnal ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume VIII No.28 Desember 2009, Fikom Universitas Moestopo, Jakarta
- Idi Subandy Ibrahim, 2007, *Kecerdasan Komunikasi Seni Berkomunikasi Kepada Publik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Kuncoro,Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi*, Perencanaan Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta
- Lian Gogali, 2009, *Konflik Poso, Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta
- N.N., 2006, *Strategi Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) Melalui Pendekatan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Riau*, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
- Ramli, *Kinerja Aparatur dan Pengembangan Wilayah*, 2007, USU Press, Medan
- Sabian Utsman, 2007, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Sebuah Penelitian Sosiologis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiarto, 2003, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tinambunan,W.E., 2002, *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik Pada Warga Kota Pekanbaru*, Lemlit, Universitas Riau, Pekanbaru

- _____, 2004, *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik Tionghoa, Batak, Melayu, Jawa dan Minangkabau di Kabupaten Bengkalis*, Pemda Bengkalis
- _____, 2006, *Strategi Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur Melalui Model Komunikasi dan Informasi*, Balitbang Riau
- _____, 2008, *Dampak Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis*, Lemlit Universitas Riau, Pekanbaru
- _____, 2010, *Pemberdayaan Komunitas Suku Sakai Dalam Mempertahankan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bengkalis*, Lemlit Universitas Riau, Pekanbaru
- _____, 2011, *Dampak Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Sakai Di Kabupaten Bengkalis*, Lembaga Penelitian, Universitas Riau
- _____, 2011, *Metode Penelitian Komunikasi*, Jilid I, Sinar Kelasens, Pekanbaru
- _____, 2011, *Metode Penelitian Komunikasi*, Jilid II, Sinar Kelasens, Pekanbaru
- _____, 2012, *Opini Publik Terhadap Informasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Studi Kasus: Masyarakat Batak*, Lembaga Penelitian, Universitas Riau

JURNAL

**Fokus Kegiatan:
KELAPA SAWIT**

**FUNGSI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA
DALAM MENGURANGI KONFLIK HORIZONTAL DAN
SENGKETA TANAH PADA PETANI KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

**PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
(PENPRINAS MP3EI 2011-2025)**

Prof.Dr.W.E.Tinambunan,Drs.,MS
Ir.Rusmadi Awza, MSi
Nurjanah, MSi



**UNIVERSITAS RIAU
NOPEMBER 2012**